



# **Mendorong Keterbukaan Pemerintah dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat**

**OGI GOES to CAMPUS**

**Asima Siahaan, PhD**

Dosen FISIP Universitas Sumatera  
Utara

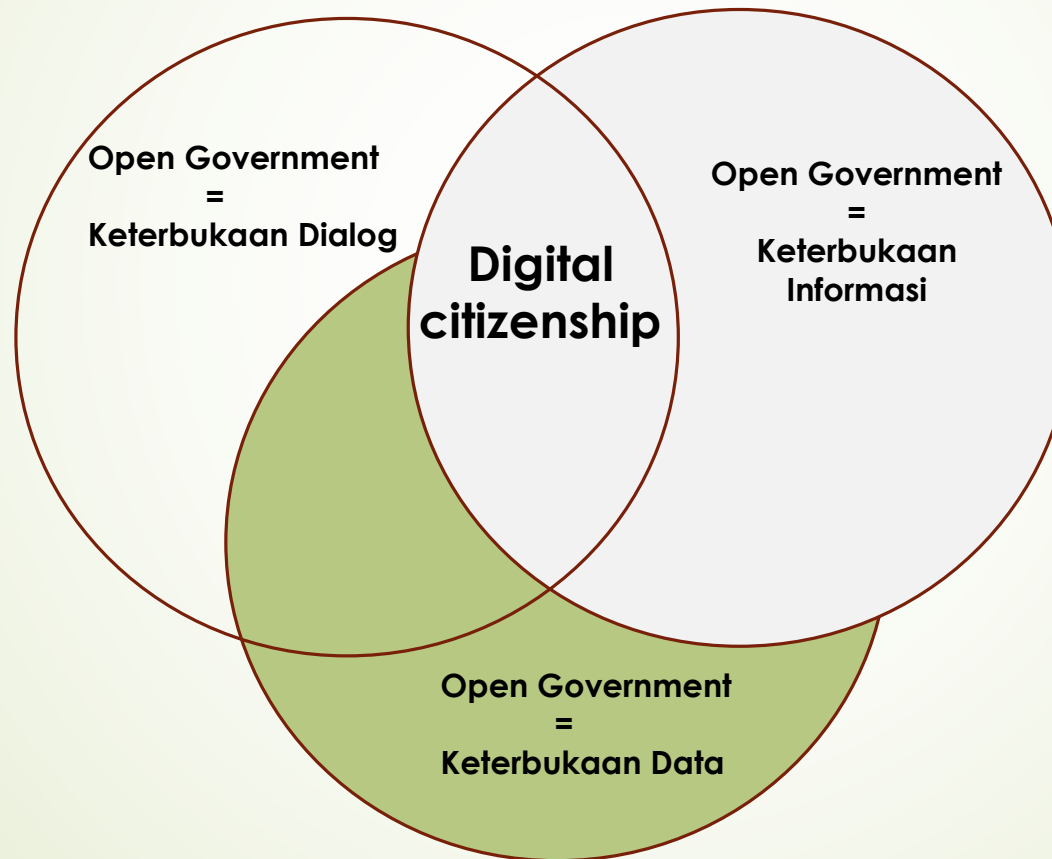
Medan, 29 Maret 2022

# Memahami Perkembangan Konsep Open Government



# SISTEM KETERBUKAAN PEMERINTAHAN

The OECD defines open government as “a culture of governance based on innovative and sustainable public policies and practices inspired by the principles of transparency, accountability, and participation that fosters democracy and inclusive growth.” (OECD 2016)



Data, pemberdayaan, ko-kreasi: memungkinkan warga negara untuk bebas berbicara, berserikat, dan berkumpul, memberdayakan warga untuk berpartisipasi, membentuk kebijakan dan layanan public, memantau dan mengawasi pemerintah.

# The OECD Recommendation on Digital Government Strategies



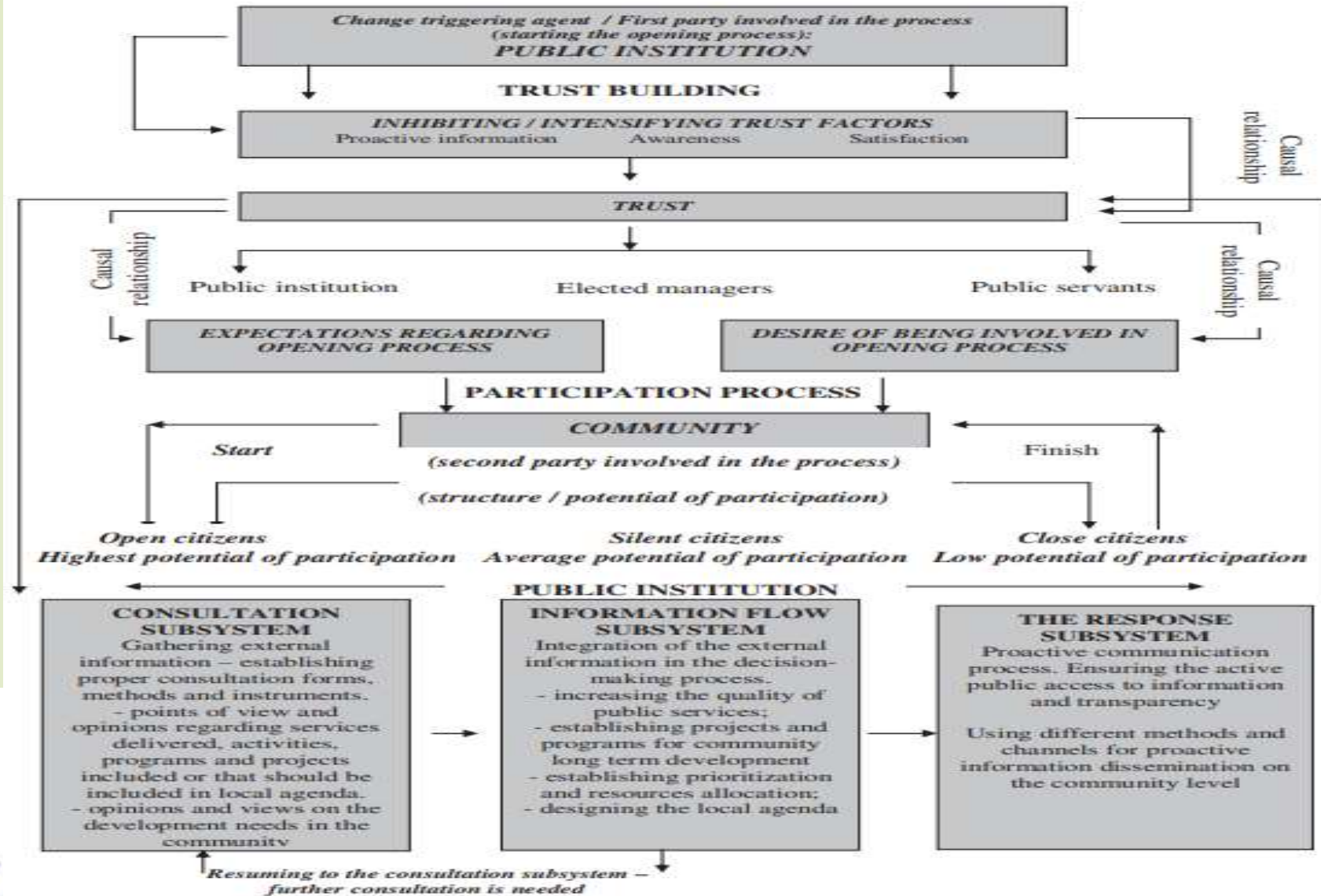
Source: OECD Recommendation on Digital Government Strategies



# PENTINGNYA PARTISIPASI DALAM OG

- Meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemahaman warga tentang isu-isu kompleks
- Meningkatkan Legitimasi. Pemahaman tentang prioritas dan nilai diantara warga dengan pemerintah yang mewujudkan kepemilikan antara institusi publik dan warga negara atas kebijakan dan keputusan yang dihasilkan.
- Mengembangkan pilihan kebijakan yang lebih terinformasi dan lebih konsensual
- Pemerintah dapat memanfaatkan kreativitas dan pengetahuan teknis warga negara
- Meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam berbagi informasi dan tanggung jawab untuk keputusan politik,
- Meningkatkan kepercayaan dan penerimaan yang lebih baik dari kebijakan publik pemerintah,

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OPEN GOVERNMENT: DEMOKRASI PARTISIPATIF



**Ko-Kreasi:**

- Produksi info/ pengetahuan
- Transfer info/ pengetahuan
- Penggunaan pengetahuan

**DEMOKRASI PARTISIPATIF:**

- Co-production
- Co-delivery
- Coevaluation

# Mengapa Open Government?

- Kebijakan publik yang lebih inklusif dan demokratis
- Perbaikan kualitas pelayanan public melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen data
- Infrastruktur data pemerintah yang lebih baik
- Tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pemberdayaan
- Dapat mengubah seluruh persepsi layanan publik dari otoritas dan penyedia layanan menjadi arena kolaborasi dan pemberdayaan
- Pertumbuhan ekonomi melalui keterbaharuan produk, pelayanan, pendapatan, keuntungan dan penciptaan pekerjaan baru

# Tantangan Open Government

Open  
government  
sebagai  
retorika

Rendahnya komitmen  
pejabat/administrator public  
dalam implementasi open  
government

Keterbatasan pengetahuan  
pejabat public tentang nilai  
tambah partisipasi masyarakat

Rendahnya  
ketertarikan  
masyarakat

Keterbatasan  
kapasitas NGO



# ISSUES: WHAT NEXT?

- Open Government sebagai ko-kreasi nilai demokrasi partisipatif: Open Government akan sulit dicapai jika hanya semata berpatokan pada efisiensi dan mengabaikan prinsip transparansi, kesetaraan, proses ko-kreasi dan inovasi
- Pentingnya Etika OP: Perubahan/transformasi interaksi pemerintah-masyarakat-bisnis dapat mempertahankan kesenjangan lama dan menciptakan kesenjangan baru. Isu2 yang muncul: tantangan interaksi keamanan, privasi, kebebasan informasi, efisiensi, transparansi dan tatakelola pemerintahan
- Keseimbangan antara Administrasi birokratik dan demokrasi
- Ko-kreasi: ketidaksetaraan, hubungan kekuasaan, dan bentuk-bentuk pemerintahan
- Bagaimana OG mampu menyediakan platform bagi masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk bergerak?
- Bagaimana menjamin partisipasi dapat diakses, setara dan inklusif untuk berbagai golongan masyarakat yang berbeda?



TERIMA KASIH

